



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Jenderal Sudirman No. 117
Telp. (0741) 23352, Fax. (0741) 23352
J A M B I

Kode POS 36138

Jambi, 09 September 2026

Nomor : S- 1025 /BKAD-1.2/IX/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Layanan Informasi Publik

Kepada
Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi
di –
Jambi

Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan sebagai bentuk komitmen **Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi** dalam memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami menyampaikan **Laporan Layanan Informasi Publik Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi**.

Sebagai bahan dokumentasi dan evaluasi penyelenggaraan layanan Informasi Publik, bersama surat ini kami sampaikan dokumen pendukung berupa:

1. **Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi tentang Penetapan/Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);**
2. **Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi.**

Dokumen tersebut merupakan bagian dari pemenuhan tata kelola layanan Informasi Publik serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi.

Demikian laporan dan dokumen pendukung ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



KEPALA BADAN,

Agus Pirngadi, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 196912151990031005



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Jenderal Sudirman No. 117
Telp. (0741) 23352, Fax. (0741) 23352
J A M B I

Kode POS 36138

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR : 08 /SK/BKAD/1.1/1/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAMBI

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi public; bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor: 763/KEP. GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor: 29 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAMBI
- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Sebagaimana struktur dan susunan anggota tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 - d. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
 - e. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - f. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh public.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 30 Januari 2026
KEPALA BADAN



AGUS PIRNGADI, S.Sos
Pembina Utama Madya
Nip.196912151990031005

1. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
2. Kepala Bidang Administrasi dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan
4. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
5. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
6. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
7. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
8. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
9. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
10. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
11. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
12. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
13. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
14. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
15. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
16. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
17. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
18. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
19. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
20. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
21. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
22. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
23. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
24. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
25. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
26. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
27. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
28. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
29. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
30. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
31. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
32. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
33. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
34. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
35. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
36. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
37. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
38. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
39. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
40. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
41. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
42. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
43. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
44. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
45. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
46. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
47. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
48. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
49. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
50. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
51. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
52. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
53. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
54. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
55. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
56. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
57. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
58. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
59. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
60. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
61. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
62. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
63. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
64. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
65. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
66. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
67. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
68. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
69. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
70. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
71. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
72. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
73. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
74. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
75. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
76. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
77. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
78. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
79. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
80. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
81. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
82. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
83. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
84. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
85. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
86. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
87. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
88. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
89. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
90. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
91. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
92. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
93. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
94. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
95. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
96. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
97. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
98. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
99. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian
100. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengkajian

KEPALABADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAMBI

Agus Pirngadi, S.Sos
Pembina Utama Madya
Nip.196912151990031005

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Jambi,
Nomor : /SK/BKAD/1.1/I/2026
Tanggal : Januari 2026

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAMBI**

- | | |
|--|--|
| i. Penanggung Jawab | : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi |
| ii. PPID | : Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Provinsi Jambi |
| iii. Sekretaris | : Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| iv. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi | : Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| v. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi | : Kasubbag Program dan Pelaporan |
| vi. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi | : 1. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah
4. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| vii. Petugas Layanan Informasi | : 1. Muhamad Firdaus, SE
2. Linawati, SH, MH
3. Mohd. Ilham Zh, SH
4. Dr. Ade Uli Siregar, SH, MH |

**KEPALABADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAMBI**



AGUS PIRNGADI, S.Sos
Pembina Utama Madya
Nip.196912151990031005